

TRANSFORMASI IDENTITAS KEWARGANEGARAAN DALAM REVOLUSI DIGITAL: TANTANGAN DAN SOLUSI

Yulia Nur Farida
Universitas Sebelas Maret Surakarta
yulianurfarida.07@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mempengaruhi perubahan revolusi digital yang semakin berkembang dengan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dalam menjaga identitas kewarganegaraan di era digital 5.0 dan menganalisis solusi dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat revolusi digital 5.0 terhadap identitas kewarganegaraan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan revolusi digital terhadap identitas kewarganegaraan yakni luntarnya identitas kewarganegaraan, tantangan privasi keamanan data, kesenjangan digital, dan polarisasi dan konflik internal di dalam masyarakat akibat berita *hoax*. Solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan pendekatan inklusif dan adaptif dari pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup edukasi dan peningkatan literasi digital di masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan inisiatif yang melawan disinformasi dan ekstremisme online, yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman digital yang merusak identitas kewarganegaraan. Kesimpulannya Revolusi digital 5.0 menantang identitas kewarganegaraan dengan risiko privasi, kesenjangan digital, dan polarisasi sosial. Solusi inklusif dan adaptif, melalui edukasi literasi digital dan kolaborasi lintas sektor, diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan integritas identitas di era digital.

Kata kunci : Revolusi Digital, Era *Society* 5.0, Identitas Kewarganegaraan, Implikasi, Tantangan

ABSTRACT

Technological developments are being influenced by the rapidly evolving digital revolution. The study is aimed at analyzing the various challenges to citizenship identity in the digital age 5.0 and at analyzing solutions for addressing the challenges that have emerged as a result of the digital revolution 5.0 to citizen identity. The method used in this research involves utilizing relevant library studies. The survey revealed the challenges expected from the digital revolution of citizenship identity, including the rise of national identities, challenges of data security and privacy, digital gaps, and internal polarization and conflict within societies caused by hoax news. The suggested solution to the problem is to involve an inclusive and adaptive approach from the government and society as a whole. This includes educating and enhancing digital literacy in the community, as well as cross-sectoral collaboration to develop initiatives that combat disinformation and extremism online, which can strengthen public resilience to digital threats that undermine citizenship identities. In conclusion, Citizenship identity is challenged by the Digital Revolution 5.0 with risks to privacy, digital disparity, and social polarization. Inclusive and adaptive solutions are required through digital literacy education and cross-sectoral collaboration to strengthen identity resilience and integrity in the digital age.

Keyword: *Digital Revolution, Society 5.0 Era, Citizenship Identity, challenges and solutions.*

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024
"Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang kian pesat mempengaruhi terjadinya revolusi digital yang ditandai dengan terjadinya peralihan dari revolusi industri 4.0 ke Era 5.0. Revolusi Industri 4.0 menegaskan bahwa perkembangan setiap teknologi selalu bermaksud untuk memperbaiki tingkat produktivitas dalam hal bisnis dan ekonomi. Hal ini berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Maka dari itu guna mengatasi dampak tersebut, muncul konsep baru yang disebut Era *Society* 5.0, yang berbeda dengan pendekatan Revolusi Industri 4.0. Era *Society* 5.0 lebih menekankan pada menciptakan keseimbangan antara berbagai inovasi yang sudah ada dengan tujuan menyelesaikan tantangan dan masalah sosial melalui peningkatan mutu sumber daya manusia. Konsep *Society* 5.0 ini bertujuan untuk membangun individu yang berpusat pada manusia, di mana setiap perubahan harus dipertimbangkan secara moral.[1]

Dalam era revolusi digital yang terus berkembang, konsep identitas kewarganegaraan menghadapi tantangan baru yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah lanskap srombak sosial, politik, dan budaya secara fundamental, mempengaruhi cara individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari suatu negara. Teknologi informasi dan komunikasi di era digital kontemporer seperti media sosial dan internet menjadi perangkat dan komponen utama dalam rutinitas sehari-hari pada setiap individu.[2]. Media sosial dan platform daring memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan komunitas global tanpa batas geografis, mengaburkan garis-garis pemisah tradisional antara identitas nasional dan identitas kosmopolitan. Situasi ini berpotensi menciptakan identitas yang lebih beragam, yang menimbulkan tantangan bagi konsep kewarganegaraan yang berlandaskan pada kedaulatan nasional setiap negara.

Di sisi lain, revolusi digital juga menciptakan peluang baru untuk memperkuat identitas kewarganegaraan. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat ikatan antara warga negara dan negara mereka melalui partisipasi dalam proses politik, pendidikan

digital tentang sejarah dan nilai-nilai nasional, serta mempromosikan solidaritas nasional di tengah tantangan global. Namun demikian, terdapat pula tantangan yang perlu dihadapi dalam mengelola identitas kewarganegaraan di era digital. Salah satunya adalah ancaman terhadap privasi dan keamanan data, yang dapat mengakibatkan keraguan terhadap institusi negara dan kerugian kepercayaan pada sistem kewarganegaraan. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks melalui platform digital juga dapat memicu polarisasi dan konflik internal di dalam masyarakat, serta melemahkan rasa solidaritas nasional.

Ketika informasi yang salah atau konten berbahaya menyebar secara luas, hal ini dapat mempengaruhi respons orang terhadap isu-isu penting, menyebabkan kesalahpahaman atau sikap yang tidak sehat dalam masyarakat digital. Pernyataan tersebut mengacu pada dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau konten yang merugikan dalam konteks masyarakat digital. Dengan demikian secara lebih luas, fenomena ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sumber informasi dan media digital, serta mempengaruhi dinamika sosial dan politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko dari penyebaran informasi yang salah dan upaya untuk mempromosikan literasi digital serta kritisisme terhadap informasi yang diterima di lingkungan digital. Serta adanya kesenjangan mengakses teknologi digital di masyarakat.

Solusi dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap identitas kewarganegaraan di era digital. Hal ini mencakup pembangunan kebijakan yang memperkuat inklusi digital, edukasi yang meningkatkan literasi digital dan kewarganegaraan digital, serta upaya kolaboratif untuk memerangi disinformasi dan ekstremisme daring. Dengan demikian, revolusi digital tidak hanya mengubah cara kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dinamika identitas kewarganegaraan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang terkait, kita dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan identitas

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

kewarganegaraan dalam konteks global yang terus berubah.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dalam menjaga identitas kewarganegaraan di era digital 5.0 dan menganalisis solusi dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat revolusi digital 5.0 terhadap identitas kewarganegaraan. Studi ini juga didukung dengan kajian teori dan literatur terkait topik tantangan revolusi digital pada identitas kewarganegaraan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan opsi solusi dalam menjaga identitas kewarganegaraan di era revolusi digital 5.0.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis studi kepustakaan. Menurut Sugiyono [3], studi pustaka adalah analisis teoritis dari referensi dan literatur ilmiah yang terkait dengan budaya, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam kondisi sosial yang sedang diteliti. Sugiyono juga mencatat bahwa kredibilitas hasil penelitian dapat ditingkatkan dengan mendukungnya menggunakan karya tulis akademik maupun karya seni yang relevan. Adapun langkah penyusunan penelitian ini dilakukan dengan melalui proses mengumpulkan literatur yang relevan, membaca, mencatat informasi penting, dan mengelola materi penelitian[4].

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan sumber informasi dan data yang akurat tentang revolusi digital dan identitas kewarganegaraan berkaitan dengan tantangan dan solusi yang tepat. Adapun sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, Jurnal dan artikel yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

HASIL

Tantangan Revolusi Digital 5.0 terhadap Identitas Kewarganegaraan

Revolusi digital, yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa dampak yang signifikan terhadap identitas kewarganegaraan di berbagai belahan dunia. Komunikasi yang cepat dan

global memungkinkan individu untuk terhubung dengan komunitas di seluruh dunia tanpa adanya hambatan geografis. Hal ini dapat mengaburkan batas-batas fisik tradisional yang biasanya menggambarkan identitas kewarganegaraan. Selain itu revolusi digital telah memperluas akses terhadap berbagai budaya dan identitas kultural. Individu dapat dengan mudah mengakses informasi tentang budaya-budaya lain, mengadopsi praktik-praktik budaya yang berbeda, dan berpartisipasi dalam komunitas-komunitas virtual dengan identitas yang beragam. Hal ini menjadi tantangan, karena dapat berpotensi membentuk identitas kewarganegaraan yang mengaburkan identitas kultural.

Teknologi digital juga telah memengaruhi partisipasi politik. Media sosial, misalnya, telah menjadi platform penting bagi warga negara untuk berbagai pandangan politik, mengorganisir gerakan sosial, dan bahkan mempengaruhi keputusan politik[5]. Revolusi digital juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi. Perkembangan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan meningkatkan potensi pengawasan oleh pemerintah dan entitas swasta, yang dapat mengancam kebebasan individu dan hak-hak kewarganegaraan. Perlindungan terhadap privasi dan keamanan data menjadi isu penting dalam konteks identitas kewarganegaraan.

Salah satu tantangan yang paling menonjol dari revolusi digital adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan isu yang mendesak yang menghalangi kemajuan sosial dan ekonomi, serta memperburuk ketimpangan[6]. Banyak individu, terutama di komunitas yang kurang terlayani dan pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai ke konektivitas internet dan perangkat teknologi yang esensial. Kesenjangan digital secara tidak proporsional mempengaruhi individu dari latar belakang ekonomi rendah, yang memperburuk kesenjangan sosial ekonomi yang sudah ada [7]. Biaya tinggi perangkat teknologi, layanan internet, dan lisensi perangkat lunak semakin membatasi akses bagi mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital dapat memperkuat ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik di

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

antara warga negara. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap identitas kewarganegaraan, dengan beberapa individu atau kelompok merasa dikesampingkan atau tidak diwakili dalam dunia digital.

Kesenjangan ini menjaga ketidaksetaraan dengan membatasi akses kepada sumber daya pendidikan, peluang pekerjaan, layanan esensial, dan partisipasi dalam kehidupan sipil. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar atau *hoax* melalui platform digital juga dapat memicu polarisasi dan konflik internal di dalam masyarakat, serta memicu *extrimesme online*. Ketika informasi yang salah atau konten berbahaya menyebar secara luas, hal ini dapat mempengaruhi respons orang terhadap isu-isu penting, menyebabkan kesalahpahaman atau sikap yang tidak sehat dalam masyarakat digital[8]. Pernyataan tersebut mengacu pada dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau konten yang merugikan dalam konteks masyarakat digital. Dengan demikian secara lebih luas, fenomena ini juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sumber informasi dan media digital, serta mempengaruhi dinamika sosial dan politik. Dengan demikian, revolusi digital telah membawa tantangan yang kompleks terhadap identitas kewarganegaraan.

Meskipun teknologi telah memungkinkan terciptanya identitas kewarganegaraan yang lebih inklusif dan terhubung secara global, ia juga menimbulkan tantangan baru terkait luntarnya identitas kewarganegaraan, tantangan privasi keamanan data, kesenjangan digital, dan polarisasi dan konflik internal di dalam masyarakat akibat berita *hoax*. Penting bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan individu untuk secara aktif mengatasi tantangan ini agar identitas kewarganegaraan dapat berkembang secara positif di era digital ini.

Solusi dalam Mengatasi Tantangan Revolusi Digital 5.0 terhadap Identitas Kewarganegaraan

Solusi untuk menghadapi tantangan kompleks terkait identitas kewarganegaraan dalam era digital 5.0 yang disarankan yakni dengan melibatkan pendekatan inklusif dan adaptif dari pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan

kebijakan yang mendukung inklusi digital. Hal ini meliputi upaya untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara dan aman terhadap teknologi informasi dan komunikasi[9]. Kebijakan ini harus tidak hanya memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga menjamin perlindungan data pribadi yang ketat guna mengurangi risiko penyalahgunaan atau kebocoran identitas.

Selanjutnya, edukasi menjadi faktor krusial dalam membangun literasi digital dan kewarganegaraan digital di kalangan masyarakat[10]. Program edukasi ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman seperti disinformasi dan ekstremisme online. Dengan meningkatkan literasi digital, individu akan lebih mampu mempertahankan dan melindungi identitas kewarganegaraan mereka dalam ruang digital yang semakin kompleks ini.

Terakhir, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Upaya bersama untuk mengembangkan inisiatif yang memerangi disinformasi dan ekstremisme online akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman digital yang bisa merusak identitas kewarganegaraan. Dengan menggabungkan kebijakan yang progresif, pendidikan yang holistik, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan berdaya guna bagi semua warga negara di era revolusi digital ini.

SIMPULAN

Tantangan yang muncul akibat adanya revolusi digital 5.0 terhadap identitas kewarganegaraan antara lain yakni luntarnya identitas kewarganegaraan, tantangan privasi keamanan privasi dan data, kesenjangan digital, dan polarisasi dan konflik internal di dalam masyarakat akibat berita *hoax*. Adapun alternatif Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan melibatkan pendekatan inklusif dan

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

adaptif dari pemerintah serta masyarakat secara keseluruhan, lalu mengedukasi dan membangun literasi digital di kalangan masyarakat serta melakukan kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan inisiatif yang memerangi disinformasi dan ekstremisme online akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman digital yang bisa merusak identitas kewarganegaraan.

Dengan demikian revolusi digital 5.0 membawa tantangan signifikan bagi identitas kewarganegaraan, seperti penurunan kejelasan identitas, risiko terhadap privasi dan keamanan data, kesenjangan digital yang semakin lebar, serta polarisasi sosial akibat penyebaran berita palsu. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang diperlukan adalah pendekatan yang inklusif dan adaptif dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi yang meningkatkan literasi digital di semua lapisan masyarakat menjadi kunci, seiring dengan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan inisiatif yang memerangi disinformasi dan ekstremisme online. Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman digital dan memastikan keberlangsungan serta integritas identitas kewarganegaraan di era digital yang dinamis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. P. Kirani and F. U. Najicha, "Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era *Society* 5.0 Mendatang," *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, vol. 8, no. 2, 2022, doi: 10.31949/educatio.v8i2.2391.
- [2] N. K. N. Widiyanti and E. F. Thalib, "The Impact of Information Technology Development on Cybercrime Rate in Indonesia," *Journal of Digital Law and Policy*, vol. 1, no. 2, 2022, doi: 10.58982/jdlp.v1i2.165.
- [3] Engel, "Sugiyono 2012," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. 2014.
- [4] dkk Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Pre-print Digital Library UIN*

Sunan Gunung Djati Bandung, vol. 6, no. 1, 2022.

[5] D. Agis Dwiyantri, I. Nurani, M. Nuryana Alfarizi, and R. Datul Hubbah, "Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Warga Negara: Dampak Positif dan Negatif," 2023.

[6] Muhajir, "Pembelajaran Daring di Era COVID-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi," *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, vol. 6, no. 2, 2020.

[7] P. Haniko *et al.*, "Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital," *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 2, no. 05, 2023, doi: 10.58812/jpws.v2i5.371.

[8] R. Alinata, E. Susanti, W. Atika Sari, S. Dinillah, and D. Nirmala Sofi, "Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKn di era revolusi industri 4.0," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JKPP)*, vol. 2, no. 1, pp. 20–29, 2024.

[9] A. Nguyen, "Digital Inclusion," in *Handbook of Social Inclusion*, Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 1–15. doi: 10.1007/978-3-030-48277-0_14-1.

[10] E. Rahmayanti, "Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan Penguatan literasi digital untuk membentuk karakter kewarganegaraan digital melalui pendidikan kewarganegaraan."